

Vol. 8, No. 1 (Juni 2013)

ISSN : 1829 - 975X

# **HISTORIA**

## **JURNAL ILMU SEJARAH**

**MERANTAU SALAH SATU KUNCI SUKSES SUKU MINANGKABAU**  
*Dewi Salindri*

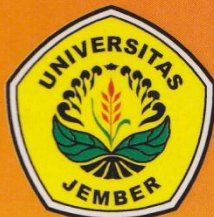
**SASTRA PEMBEBASAN DALAM GENRE NOVEL SEJARAH INDONESIA:  
TELAAH KRITIK SASTRA FEMINISME POSKOLONIAL**  
*Bambang Aris Kartika*

**DINAMIKA KEHIDUPAN NELAYAN DI KARESIDENAN BESUKI  
1850-1970**  
*Siti Sumardiati*

**MAKNA DAN FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF SEJARAH**  
*Sri Ana Handayani*

**KORUPSI SEBAGAI TANDA MELEMAHNYA BIROKRASI  
PADA MASA ORDE BARU**  
*Parwata*

**ASIMILASI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA ETNIS CINA DI  
WILAYAH EKS KOTATIF JEMBER**  
*Mrr. Ratna Endang Widuatie*



**JURUSAN SEJARAH FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS JEMBER**



# HISTORIA

JURNAL ILMU SEJARAH

**HISTORIA** adalah jurnal ilmiah untuk media publikasi hasil penelitian atau kajian analisis kritis dalam bidang ilmu sejarah

## DEWAN REDAKSI

**Ketua:**

Dr. Nawiyanto, M.A.

**Sekretaris:**

Drs. Nurhadi Sasmita

**Penyunting Ahli:**

Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A.

Prof. Dr. Aiko Kurasawa Inomata

Dr. Pierre van der Eng

Dr. J. Th. Lindblad

Dr. Huub de Jonge

**Penyunting Pelaksana:**

Drs. Parwata, M.Hum.

Drs. Edy Burhan Arifin, SU

Dra. Siti Sumardiati, M.Hum.

Drs. I.G. Krisnadi, M.Hum.

**Pelaksana Tata Usaha:**

Eko Crys Endrayadi, SS, M.Hum.

Sunarlan, SS, M.Si.

Tri Chandra Apriyanto, SS.

**Periode Terbit:** enam bulan sekali (Juni dan Desember). **Terbit pertama:** Juni 2004.  
**Penerbit:** Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember. **Alamat Redaksi:**  
Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37  
Jember, 68121. Telp. (0331) 337188, Fax. (0331) 332738, **Email:**  
kulturhistoriaunej@gmail.com



**DAFTAR ISI**

1. **MERANTAU SALAH SATU KUNCI SUKSES SUKU  
MINANGKABAU**  
Dewi Salindri ..... 1-16
  
2. **SASTRA PEMBEBASAN DALAM GENRE NOVEL SEJARAH  
INDONESIA: TELAAH KRITIK SASTRA FEMINISME  
POSKOLONIAL**  
Bambang Aris Kartika..... 17-34
  
3. **DINAMIKA KEHIDUPAN NELAYAN DI KARESIDENAN  
BESUKI, 1850-1970**  
Siti Sumardiati..... 35-44
  
4. **MAKNA DAN FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF  
SEJARAH**  
Sri Ana Handayani ..... 45-52
  
5. **KORUPSI SEBAGAI TANDA MELEMAHNYA BIROKRASI  
PADA MASA ORDE BARU**  
Parwata..... 53-60  
...
  
6. **ASIMILASI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA ETNIS CINA DI  
WILAYAH EKS KOTATIF JEMBER**  
Mrr. Ratna Endang Widuatie..... 61-79



## SASTRA PEMBEBASAN DALAM GENRE NOVEL SEJARAH INDONESIA: TELAAH KRITIK SASTRA FEMINISME POSTKOLONIAL

Bambang Aris Kartika\*

**Abstract:** This article discusses postcolonial feminist literary criticism in the literary genre of the history of Indonesia. It deals with literary forms of resistance shown by female protagonist of the practices of colonialism and patriarchy bondage experienced by indigenous women. By employing a postcolonial feminist approach to literary criticism, it can be found the resistance patterns of indigenous women, such as by deconstructing the practice of arranged marriages, by their involvement in political organizations, in education for indigenous women, and the use of mass media as a form of social control and political criticism. The emergence of the historical literary genre taking the indigenous women opposition against the practices of colonialism and hegemony of patriarchy is able to bring enlightenment and awareness of the importance of gender equality, and that the literary works can be positioned as a form of cultural liberation of women.

**Keywords:** Indonesia historical novel, postcolonial feminist criticisms, liberation literature

### I. Pengantar

Teeuw mengatakan bahwa karya sastra tidak dapat meninggalkan diri pengarang dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan karya sastra itu terlahir tidak dari kekosongan budaya.<sup>1</sup> Artinya, dalam kerangka sosiologi dan kebudayaan bahwa karya sastra tidak dapat dilepaskan dari pengarang yang menulisnya sebagai pribadi dalam sebuah kelompok masyarakat atau komunitas yang memiliki pikiran maupun pandangan dunia serta sebagai makhluk dinamis yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Seringkali terjadi bahwa pengarang mengaktualisasikan kritiknya melalui karya-karyanya apabila dalam kehidupan ditemukan ketimpangan sosial maupun praktik-praktik ketidakadilan.

Proses kelahiran karya sastra diprakondisi oleh kode sosial budaya yang melingkupi pengarang.<sup>2</sup> Dengan demikian sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Artinya, hubungan antara (aspek-aspek) teks sastra dan susunan masyarakat,

\*Dosen Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember.

<sup>1</sup>Wachmat Djoko Pradopo, *Pengkajian Puisi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 125.

<sup>2</sup>Seymour Chatman, *Story and Discourse, Narrative Structure in Fiction and Film* (Ithaca : Cornell University Press, 1978), hlm. 26.



sejauhmana sistem serta perubahannya tercermin dalam sastra. Sastra pun dipergunakan sebagai sumber untuk menganalisa sistem masyarakat.<sup>3</sup>

Banyak karya sastra yang ditulis oleh pengarang sebagai wujud dari kritik atau pun protes atas apa yang menimpa masyarakat sebagai individu yang terlahir memiliki kemerdekaan atas dirinya sendiri maupun hak asasi dirinya selaku manusia. Dan, sepanjang sejarah perkembangan peradaban manusia, seringkali berlaku penindasan atas nama memperadabkan manusia dari kelompok lain yang dianggap masih belum beradab, khususnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh bangsa kulit putih Eropa yang mengkolonialisasi Indonesia sebagai bangsa jajahan dan harus diperadabkan. Sehingga tujuan awal memperadabkan manusia, justru yang berlaku sebaliknya menistakan dan menindas bahkan melecehkan harkat dan martabat manusia jajahan. Bangsa kulit putih Eropa, khususnya Belanda, merepresentasikan masyarakat Indonesia dengan stereotipe negatif dan rasisme seperti penyebutan *inlander*, kaum pribumi, jongos, perbudakan (*slave*), praktik konkubine (*concubine*) atau pernyaaian.

Praktik kolonialisme pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, telah menorehkan catatan sejarah hitam dan kelam bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan. Setiap kali peperangan terjadi, maka perempuan, orang lanjut usia, dan anak-anak seringkali menjadi pihak yang paling banyak menjadi korban. Perempuan Indonesia banyak yang dijadikan gundik atau nyai maupun *jugun ianfu*. Bahkan banyak di antara perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual memilih mengakhiri hidupnya dengan kematian, di samping secara psikologis menanggung beban berat atas perlakuan pelecehan dan menistakan diri mereka sebagai seorang manusia.

Berangkat dari realitas posisi perempuan yang senantiasa direpresentasikan dengan stereotipe negatif serta perlakuan subordinatif yang melecehkan, mendorong pengarang perempuan untuk melakukan upaya-upaya kritik terhadap persoalan tersebut. Dan semangat perlawanan itu senantiasa terus dijaga dan dihidupkan agar masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia, mencatat dan tidak begitu mudah melupakan kasus-kasus penistaan dan penindasan oleh dominasi budaya patriaki yang masih menjadi bagian budaya sebagian masyarakat Jawa di Indonesia. Melalui

---

<sup>3</sup>Luxemburg, Bal dan Weststjein, *Pengantar Ilmu Sastra* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 24.



penciptaan dan penulisan karya sastra, perlawanan terhadap representasi dan refleksi atas kolonialisasi diwujudkan, terutama perlawanan terhadap sistem budaya patriarkal dari para laki-laki kulit putih Eropa maupun kaum laki-laki ningrat yang berkuasa.

Kehadiran pengarang perempuan yang membawa misi pencerahan melalui karya sastra, menunjukkan adanya upaya pembebasan kultural bagi kaum perempuan Indonesia. Karya sastra sebagai cerminan hidup manusia, harus mampu membebaskan masyarakat dari ideologi, belenggu budaya patriarki, dan struktur maupun konstruksi gender secara sosiologis dan budaya bagi terbangunnya kecerdasan dan perlawanan perempuan menuju semangat *equality*. Melalui penciptaan novel-novel sejarah yang mengangkat tema-tema perjuangan dan perlawanan kaum perempuan terhadap praktik kolonialisme, maka tujuan dari para pengarang perempuan dengan menjadikan karya sastra sebagai sebuah sastra pembebasan akan tercapai. Realitas dan fenomena ini dapat ditemukan dari novel bergenre sejarah karya Afifah Afrah yaitu *De Winst*.

Dalam novel tersebut, pengarang secara superior merepresentasikan tokoh utama perempuan melakukan dekonstruksi dan pendobrakan sosial dan budaya serta politik terhadap aturan atau pun hukum kolonial Belanda, khususnya yang terjadi di lingkungan golongan bangsawan atau ningrat Solo maupun di Pabrik Gula *De Winst* yang tidak berpihak kepada perempuan pribumi. Melalui pendekatan kritik sastra feminisme postkolonial untuk menelaah novel berlatar sejarah ini akan terlihat dengan jelas semangat mengedepankan sastra pembebasan sebagai ideologi pengarang. Apalagi, pengarang melalui tokoh utama perempuan memfokuskan gerakan pembebasan dimulai dari memberikan akses kemudahan pendidikan kepada perempuan pribumi maupun mendobrak kemapanan budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai subordinat.

## 2. Teori dan Metode Analisis

Pada umumnya postkolonial didefinisikan sebagai teori yang lahir sesudah kebanyakan negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaannya. Bidang kajiannya mencakup seluruh khazanah tekstual nasional, khususnya karya sastra yang pernah mengalami kekuasaan imperial sejak awal kolonialisasi hingga sekarang<sup>4</sup>. Oleh karena itulah, teori

---

<sup>4</sup>Ashcraft, Bill, dkk. *Menelanjangi Kuasa Bahas : Teori dan Praktik Sastra Postkolonial*. Terjemahan Senjadin Arif (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. xxii-xxiii.



postkolonialisme, khususnya postkolonialisme Indonesia melibatkan tiga pengertian, yaitu: (1) Abad berakhirnya imperium kolonial di seluruh dunia; (2) Segala tulisan yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kolonial sejak abad ke-17 hingga sekarang; dan (3) Segala tulisan yang ada kaitannya dengan paradigma superioritas Barat terhadap inferioritas Timur, baik sebagai orientalisme maupun imperialism dan kolonialisme.<sup>5</sup>

Melalui penerapan teori postkolonial diharapkan para kritikus sastra dapat membongkar hegemoni kolonial yang tercermin dalam teks sastra dan mampu memposisikan sastra tidak semata-mata sebagai karya fiksi, yang menurut Horace, bersifat *dulce et utile* semata. Namun seyogyanya mampu menjadi media pembebasan dan perlawanan masyarakat tertindas terhadap praktik-praktik ketidakadilan yang dipengaruhi oleh ideologi dan semangat kolonialisasi. Pengarang yang menciptakan karya sastra dilandasi oleh ideologi pembebasan, maka akan tercermin dalam karyanya semangat pencerahan dan pencerdasan bagi pembacanya. Artinya, ada kontribusi bagi proses pencerdasan pemikiran dan pengakuan kemerdekaan atas hak asasi manusia lewat novel sejarah.

Ciri-ciri khas postkolonialisme kenyataan bahwa objeknya adalah teks-teks yang berkaitan dengan wilayah bekas jajahan imperium Eropa, khususnya Indonesia.<sup>6</sup> Dalam karya sastra teks diwujudkan oleh bahasa, sehingga dapat merepresentasikan kenyataan-kenyataan praktek kolonialisme dengan memaparkan hegemoni superioritas Barat terhadap inferioritas Timur. Representasi ini dimunculkan melalui narasi, plot, citra, gagasan, yang disimpulkan dan dikreasikan dari perspektif ide pokok, seperti: pesan, tema, dan pandangan dunia. Dalam postkolonialisme, representasi bahasa memegang peranan. Karya sastra yang ditulis pada masa kolonial, seperti novel, termasuk karya-karya yang ditulis sebelum dan sesudahnya mewakili ideologi kolonialisme dan dengan sendirinya dapat dianalisis melalui teori postkolonialisme<sup>7</sup>. Dengan demikian, novel *De Winst* karya Afifah Afra sangat tepat apabila dianalisis melalui pendekatan postkolonialisme. Karena representasi bahasa dalam teks yang dikemukakan merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia, meskipun karya sastra tersebut ditulis pada masa sekarang.

---

<sup>5</sup>Nyoman Kuntha Ratna, *Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 96.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 125.



Hellwig mengemukakan bahwa kritik sastra feminisme sebagai pendekatan untuk membaca satu per satu karya sastra Indonesia secara sinkronis kemudian memetakannya secara diakronis untuk menjawab satu permasalahan pokok, yaitu citra perempuan dalam sastra Indonesia.<sup>8</sup> Terkait dengan orientasi dan tujuan dari teori feminisme, maka penerapan kritik sastra feminisme, pada karya sastra yang berlatar belakang budaya Jawa, dimana kaum feminis memandang bahwa umumnya kultur Jawa merupakan sebuah kultur yang tidak memberikan tempat bagi kesejajaran antara laki-laki dan wanita. Dalam budaya Jawa, wanita menempati peran atau posisi subordinat dan marginal.<sup>9</sup>

Novel *De Winst* karya Afifah Afra bisa diklasifikasikan sebagai novel bergenre sejarah. Karena tema dan plot cerita berisi tentang empirisme praktik kolonialisasi Belanda meskipun *setting* lokasinya kejadian di sebuah Pabrik Gula *De Winst* milik orang kulit putih Eropa serta kebudayaan Jawa. Pada masa kolonialisme Belanda penguasaan sektor perkebunan dan banyak masyarakat pribumi dijadikan sebagai pekerja atau budak. Mereka pada umumnya dibayar dengan upah rendah. Akibatnya, muncul perlawanan-perlawanan dari kaum buruh pekerja pabrik dengan melakukan pemberontakan. Di samping itu, kekuasaan Belanda juga sudah memasuki istana sehingga raja bertekuk lutut dan menuruti peraturan dari pihak penguasa Belanda. Hukum yang berlaku pun merupakan hukum penguasa kolonialis. Hukum kolonialis ini merupakan produk legislatif yang paling merugikan terhadap posisi dan peran perempuan pribumi, salah satunya adalah perilaku diskriminasi terhadap akses pendidikan antara golongan priyayi laki-laki dengan perempuan. Semangat perlawanan dengan orientasi pada memberikan pencerahan dan pembebasan terhadap belenggu dominasi kekuasaan patriarki kaum kolonialis yang direpresentasikan sebagai kelompok maskulin dan superior di hadapan perempuan pribumi.

---

<sup>8</sup>Lihat Adab Sofia, *Aplikasi Kritik sastra Feminisme Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1.

<sup>9</sup>Tinna Gumilar, "Tubuh dan Penubuhan Dalam Cerpen Sri Sumarah Karya Umar Kayam : Telaah Pascakolonial dan Feminisme". *Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto*. Vol.3. No. 2, 2008, hlm. 290-301.



### 3. Dekonstruksi terhadap Praktik Perjodohan

Konsep budaya Jawa yang memposisikan perempuan sebagai subordinat kaum laki-laki karena eksistensi budaya patriarki juga mengakibatkan terjadinya bias gender terhadap perjodohan dan seks perempuan. Budaya Jawa telah menempatkan perempuan menjadi *konco wingking*, maupun stereotipe budaya, seperti *nerima ing pandum*, pasrah dan *manut* dengan suami. Apapun yang menjadi keputusan suami atau laki-laki maka perempuan harus mengikuti tanpa harus membantah. Perempuan Jawa berhadapan dengan suatu sistem budaya yang memang tidak memperbolehkan mereka mendebat atau sekedar menyampaikan pendapatnya. Karena apabila menolak apa yang menjadi titah suami atau laki-laki maka mereka dianggap tidak menghormati suami. Salah satu praktik budaya patriarki adalah penguasaan kaum laki-laki terhadap sistem dan aturan adat perkawinan atau perjodohan bagi kaum perempuan, termasuk urusan domestik perempuan yang dikenal dengan istilah 3M (macak, manak, masak).

“*Nduk*, Raden Mas Ranga Puruhita itu calon suamimu!”

Tawa Sekar kembali terdengar, bergelak. “Suami? Ya ampun... di zaman serba modern seperti ini, masih ada juga yang namanya perjodohan. Ibu, bahkan di Perancis sana, raja-raja yang berkuasa sudah tumbang. Raja Louis dan permaisurinya, Maria Antoniette telah digunting lehernya oleh rakyat yang marah dengan kesewenang-wenangan mereka hingga tewas. Kini, angin demokrasi telah berhembus di seluruh penjuru Eropa, termasuk negeri Belanda. Kekuasaan Ratu Wilhelmina sudah tak lagi absolut, karena ia telah didampingi perdana menteri dan parlemen. Semua orang sederajat dan tidak boleh saling memaksakan kehendak.”

“Tetapi ini Jawa, *Nduk* ... bukan Perancis atau Belanda. Sudahlah... jangan banyak membantah. Anak prawan, harus *nunut* sama *paugeran*, ndak boleh memberontak,” tegas Sang Ibu akhirnya. “Sekarang, dandanlah yang rapi. Nanti Ramamu *duka* sama dirimu. Kau bisa dilarang bepergian lagi seperti setahun yang lalu.” (De Winst, 2010:76-77)

Data tersebut menunjukkan semangat perlawanan Sekar Pembayun terhadap keputusan orang tuanya terkait dengan perjodohannya dengan laki-laki yang memang tidak dicintainya. Namun, semata-mata dilatarbelakangi oleh tradisi perjodohan yang selama ini berlaku dalam masyarakat Jawa, khususnya dari golongan ningrat yang selalu mendasarkan perjodohan karena berstatus sama-sama priyayi yang berdarah ningrat. Apabila mereka menolak maka dianggap menyalahi aturan budaya atau *paugeran* yang



memang mengikat masyarakat Jawa. Bahkan apabila menolak maka hukuman dari orang tua pun merupakan wujud dari konsekuensi logis penolakan keputusan orang tuanya, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh ayahandanya, sedangkan sang ibu sebatas sebagai mediator saja dan bukan sebagai pengambil keputusan.

Apa yang dilakukan oleh Sekar Pembayun merupakan suatu perilaku yang mengarah pada sikap pembebasan pada kaum perempuan pribumi, untuk melakukan perlawanan atau pun pemberontakan secara kultural terhadap keputusan-keputusan yang bersifat patriarkal. Wawasan dan pengetahuan yang dimilikinya mampu memberikan suatu pencerahan bagi kaum perempuan dengan memberikan alasan-alasan rasional untuk menentang perjodohan. Bahkan Sekar Pembayun juga memberikan deskripsi peristiwa yang terjadi di Eropa dan hanya orang terpelajar saja yang mampu memberikan pembahasan dan pencerahan tentang pentingnya ideologi dan pemikiran demokratisasi bagi kaum perempuan.

Dari teks karya sastra yang ditulis oleh pengarang juga mengindikasikan adanya ideologi pembebasan bagi kaum perempuan pribumi yang pernah mengalami masa kolonialisme. Dan teks yang dikemukakan juga masih sangat relevan untuk masa sekarang di tengah arus budaya Barat yang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Masih berlaku praktik-praktik perjodohan maupun sikap-sikap yang bias gender yang dilakukan oleh kaum laki-laki dengan memegang teguh ideologi dan konsepsi budaya patriarki, meskipun Indonesia sudah terbebas dari belenggu penjajahan. Tapi sifat dan sikap kolonialis masih terwujud dari perilaku dan sikap maupun pandangan budaya sebagai masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa.

#### **4. Perjuangan Emansipasi terhadap Pendidikan Perempuan**

Dalam mozaik sejarah Indonesia dikenal sosok perempuan ningrat dari Rembang yaitu R.A. Kartini yang menerbitkan buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Sebuah kumpulan tulisan yang merupakan pengejawantahan pemikiran, ideologi, sikap dan pandangan hidupnya terhadap posisi dan fungsi perempuan Indonesia pada masa kolonialisme. Perenungan dan kritik dirinya terhadap hukum kolonial maupun praktik budaya patriarki telah memunculkan semangat pencerahan dan pembebasan bagi kaum perempuan agar eksistensi mereka diakui sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Akhirnya,



arah perjuangannya yang menuntut adanya emansipasi telah menjadi rumusan yang menginspirasi kaum perempuan pribumi, terutama dari golongan ningrat dan berpendidikan untuk melakukan suatu gerakan pembebasan bagi kaum perempuan melalui aktualisasi pendidikan. Karena pendidikan merupakan kunci utama bagi tercapainya cita-cita dan tujuan perjuangan emansipasi perempuan.

...Sekar ternyata bersekolah hingga AMS. Menurut Suryadi, anak Raden Ngabehi Suratman yang ambtenaar BB itu, Sekar pernah bersikeras hendak melanjutkan ke sekolah hukum di Jakarta. Hanya saja, keinginan itu ditentang keras oleh Sang Ayahandanya... (De Winst, 2010:84)

Teks karya sastra yang ditulis oleh Afifah Afra menunjukkan bukti representasi dari ideologi, pemikiran, sikap maupun pandangan hidup R.A. Kartini yang harus dimiliki oleh perempuan pribumi yang direpresentasikan pada sosok Sekar Pembayun. Alur cerita yang mendeskripsikan sosok Sekar Pembayun yang ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah hukum di Jakarta merupakan wujud dari pentingnya emansipasi bagi kaum perempuan dari sisi pencapaian kualitas pendidikan.

Ketika sistem hukum kolonial maupun aturan-aturan budaya patriarki yang membelenggu kemajuan pemikiran perempuan, maka Sekar pembayun dihadirkan oleh pengarang sebagai sosok atau tokoh utama yang membawa misi dan mengemban visi mencerdaskan kaum perempuan dengan ingin meraih pendidikan hukum yang selama masa kolonial secara privileg hanya dimiliki oleh kaum laki-laki pribumi dari golongan ningrat maupun borjuis maupun dari kelompok kulit putih Eropa.

Melalui karya sastra yang ditulisnya ini, Afifah Afrah menunjukkan bahwa sastra bisa difungsikan sebagai media pembebasan dari aturan maupun budaya yang merugikan maupun memposisikan subordinat kaum perempuan oleh dominasi dan hegemoni laki-laki, baik lokal pribumi ningrat maupun kulit putih Eropa. Terlebih lagi dalam kaitannya dengan peran emansipasi perempuan dalam kepentingan kemudahan akses maupun jaminan atas hak yang sama atas pendidikan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sehingga melalui emansipasi dalam bidang pendidikan akan memberi pengaruh kepada upaya mencerdaskan kaum perempuan Indonesia dan membebaskan diri mereka dari belenggu kebodohan maupun subordinasi secara sosial dan budaya apalagi politik dan ekonomi maupun seksual.



### 5. Negosiasi dalam Merebut Ruang Kekuasaan Patriarki

Dalam konsepsi budaya patriarki, maka kekuasaan secara mutlak dimiliki oleh kaum laki-laki. Pihak perempuan sebatas menerima apa pun keputusan sang suami atau pun laki-laki. Sehingga memang tidak dibuka ruang bagi perempuan untuk melakukan negosiasi maupun diplomasi terkait pengambilan keputusan-keputusan. Pengambilan keputusan menurut budaya Jawa, merupakan hak prerogatif dan domain maskulinitas. Namun, dalam novel *De Winst* karya Afifah Afra ini, konsepsi tersebut diruntuhkan atau dibongkar dengan memunculkan tokoh perempuan, yang bernama Pratiwi, untuk merebut ruang negosiasi dan diplomasi terkait dengan pengambilan keputusan. Justru di tangan perempuan, sikap tegas dan konsisten dalam memegang prinsip terkait dengan pengambilan keputusan, dibandingkan dengan oleh laki-laki yang cenderung permisif dengan terbukanya celah kelonggaran-kelonggaran aturan, lebih-lebih apabila aturan itu menguntungkan bagi mereka.

“Dalam bayangan Rangga, perwakilan dari desa yang tanahnya hendak disewa oleh De Winst itu adalah lelaki bertubuh kekar seperti warok yang bersuara keras menggelegar dengan kolor di pinggang ... Tetapi ia telah salah sangka, karena yang datang setengah jam kemudian, ternyata adalah seorang perempuan. Benar ia diiringi oleh beberapa lelaki, akan tetapi terlihat jelas bahwa para lelaki itu memasrahkan sepenuh jalannya perundingan kepada sang perempuan bernama Pratiwi itu.

“Saya membaca di pekabaran, khususnya De Express bahwa De Winst mendapatkan laba sangat besar dan disebut-sebut sebagai perusahaan yang tangguh meski disergap malaise,” ujar gadis belia itu dengan tenang. Ia bahkan menguasai teknik-teknik diplomasi dengan sangat baik. Satu-satunya kekurangan dia adalah... penampilannya yang jauh dari meyakinkan. “Hampir 70 tahun sejak berdiri, De Winst menyewa tanah kami dengan harga yang sangat murah. Tentu saja kami sudah sangat dirugikan. Jika tanah itu kami garap sendiri, maka kami akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Setelah menyadari hal tersebut, apakah salah jika kami meminta kenaikan sewa?”

“Ya... ya,” ujar *Meneer* Biljmer, gugup. “Akan tetapi, harga yang kami bayarkan ke warga selama ini, adalah harga yang telah disepakati bersama. Kami melakukan teken kontrak di depan kontrolir dengan kekuatan hukum yang mengikat.”

“Saya tidak menyalahkan pihak maskapai De Winst, meskipun saya menyayangkan, mengapa Tuan-Tuan di maskapai ini begitu saja membodohi mereka dengan nilai sewa yang sangat tidak manusiawi. Bahkan saya melihat bahwa kebodohan orang-orang desa itu sengaja dimanfaatkan untuk mengeruk provit sebesar-besarnya. Oleh karena itu,



wajar bukan, jika setelah kami menyadari hal tersebut kami mengajukan kenaikan sewa?" (De Winst, 2010:94-95)

"Jika dihitung dari laba yang diperoleh De Winst, apa yang kami minta ini sebuah kewajaran. Ini adalah harga mati. Jika De Winst tidak memperpanjang kontrak, kami siap menggarap sendiri tanah kami dan kami yakin, bahwa kehidupan kami justru akan semakin membaik."

Ancaman yang cukup menggiriskan. Seandainya semua pribumi bersikap seperti itu, para pemodal asing tak akan bersikap seenak sendiri kepada mereka. Diam-diam Rangga sibuk berpikir, siapa yang telah mengajarkan kepada gadis manis yang terlihat polos dan lugu itu sehingga bisa seberani itu. Bahkan seorang Tuan Biljmer pun tampak kualahan dalam menghadapinya.

"Anda sama sekali tidak berniat menurunkan penawaran Anda?" tanya Tuan Biljmer

Gadis itu, Pratiwi, mengangkat wajahnya, lantas menggeleng tegas. "Kami katakan tadi, permintaan kenaikan sewa tanah itu, bagi kami adalah harga mati..."

Tuan Biljmer menggigit-gigit bibirnya dengan wajah bingung. "Baiklah...baiklah, Nona... beri kami waktu untuk berpikir..." (De Winst, 2010:96)

Data tersebut menunjukkan suatu sikap meruntuhkan dominasi dan hegemoni ruang terkait dengan konsepsi kekuasaan yang cenderung mengarah pada sifat maskulinitas pada masa kolonialisme maupun tatkala berlakunya suatu sistem feodalisme yang pernah terjadi di Indonesia. Pratiwi berani mewakili warga desa yang tanahnya disewa dengan harga murah untuk melakukan negosiasi dan diplomasi meskipun yang dihadapi adalah pemilik Pabrik Gula *De Winst*. Bahkan kemampuannya dalam melakukan diplomasi bicara mampu menaklukkan dan mengalahkan diplomasi bicara dari pihak *De Winst* yang notabene adalah seorang laki-laki Eropa. Kemampuan mengolah kata dalam berdiplomasi maupun bernegosiasi menunjukkan kecerdasan sebagai perempuan yang tidak seyogyanya dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki.

Teks karya sastra yang mendeskripsikan kemampuan bernegosiasi maupun berdiplomasi pada diri tokoh Pratiwi oleh pengarang, merupakan wujud representasi dari sastra pembebasan bagi kaum perempuan pribumi untuk berani merebut ruang kekuasaan yang masih sangat patriarkal. Melalui karya sastra novel *De Winst* ini, pembaca perempuan secara pragmatik akan memperoleh suatu pencerahan pemikiran sehingga membebaskan diri dari dominasi dan hegemoni pengambilan keputusan yang selama ini bercirikan maskulinitas.



Dalam konteks diplomasi dan negosiasi, seringkali ranah tersebut diidentikkan dengan ruang dan domain dari sifat maskulinitas. Secara konstruksi sosial dan budaya, perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan melakukan negosiasi dan diplomasi karena perempuan diartikan dan diposisikan sebagai makhluk yang irasional, emosional, lemah, penakut. Sementara laki-laki diidentikkan sebagai makhluk yang tegas, rasional, kuat, berani. Stereotipe inilah yang kemudian oleh Afifah Afra sebagai pengarang, coba didekonstruksikan atau diruntuhkan dengan berlandaskan oleh ideologi gender serta gerakan feminisme, pada diri Pratiwi yang digambarkan dan dikarakterkan sebagai pribadi perempuan yang tegas, kuat, rasional, berani. Sejatinya pada diri perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Rangga yang mengagumi dan terkejut melihat kecerdasan, ketegasan, kekuatan, keberanian, dan rasionalitas yang dimiliki oleh Pratiwi dalam berhadapan dengan *Meneer* Biljmer. Artinya, posisi pengarang perempuan mampu menampilkan suatu tematik dan membangun karakter tokoh perempuan sebagai bentuk perlawanan intelektual dan kultural yang berorientasi pada aktualisasi karya sastra pembebasan melalui genre novel sejarah.

#### **6. Organisasi Politik Sebagai Alat Perjuangan**

Sejarah membuktikan bahwa peran organisasi sangat penting terkait dengan upaya membebaskan bangsa terjajah dari kaum kolonialis. Bangsa Indonesia sadar akan sebuah cita-cita kemerdekaan berawal dari lahirnya organisasi-organisasi yang didirikan oleh para cendekiawan pribumi, seperti Boedi Oetomo sehingga memunculkan kesadaran para pemuda untuk bersatu melawan tirani penjajah dan berjuang untuk meraih kemerdekaan. Setidaknya dari organisasi Boedi Oetomo menjadi tonggak lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Ki Hadjar Dewantara yang bergerak mencerdaskan kaum pribumi dengan organisasi berbasis pendidikan yaitu Taman Siswa. Demikian juga dengan Ahmad Dahlan yang melahirkan dan mendirikan tidak semata-mata organisasi keagamaan melainkan juga bergerak pada ranah pendidikan, sosial, dan kesehatan melalui organisasi Muhammadiyah. Ir. Soekarno muncul memimpin bangsa Indonesia melawan penjajah hingga meraih kemerdekaan juga berangkat dari organisasi politik yang ditekuninya seperti Partai Nasional Indonesia (PNI). Hal tersebut membuktikan bahwa melalui organisasi, baik itu berorientasi pada politik, sosial, ekonomi, budaya,



maupun pendidikan mampu memberi kontribusi positif bagi kemajuan pemikiran, sikap, kepribadian, dan semangat perjuangan bagi bangsa serta mampu membebaskan bangsa terjajah dari penindasan kaum kolonialis.

Afifah Afra sebagai pengarang, juga mendeskripsikan tentang upaya kaum perempuan dalam meraih kemerdekaan bangsa dan perjuangan meruntuhkan dominasi kekuasaan patriarki dari kaum penjajah Belanda melalui penyadaran akan pentingnya organisasi politik dalam melawan penjajah. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan Sekar Pembayun dalam Partai Rakyat karena didorong oleh semangat dan ideologinya memperjuangkan nasib bangsanya, terlebih lagi kaum perempuan yang tertindas tidak saja oleh praktik kolonialis kaum kulit Putih Eropa melainkan juga oleh tradisi kolot yang membelenggunya.

“Dia dilarang untuk keluar dari rumahnya. Ia ditekan oleh ayahnya. Bahkan, ia tidak diperbolehkan aktif kembali di Partai Rakyat yang sudah bertahun-tahun ia ikuti. Sejak kecil, ia memang sudah dibatasi gerakannya. Namun ia senantiasa berontak. Senantiasa memanfaatkan berbagai celah yang ia dapati untuk berperan dalam pergerakan menuju kemerdekaan. Dan inilah klimaks dari kekerasan ideologi yang dilakukan ayahandanya. Ia dipenjara di kompleks Dalem Suryakusuman.”

“Anda sebut apa yang dilakukan ayahanda Sekar sebagai kekerasan ideologi?”

“Ya. Ayah Sekar melarang puterinya itu untuk melakukan apa yang menjadi idealismenya, bukankah itu adalah kekerasan ideologi? Sang ayah begitu menginginkan Sekar menjadi seorang wanita Jawa tulen sesuai dengan *keratabasa* dari wanita itu sendiri, *wani ditata*. Seorang wanita Jawa, harus *manut* dengan segenap *paugeran*, tak boleh memberontak, meskipun apa yang harus dimanuti itu, berlawanan dengan kata hati, bahkan dengan nilai-nilai kebenaran yang sejati.”

Rangga menghela nafas panjang. “sebenarnya, apa saja kegiatan Sekar selama ini?”

“Dia... dia adalah seorang gadis yang sangat bersemangat. Baik lewat Partai Rakyat maupun secara pribadi, ia sangat gencar memperjuangkan nasib bangsanya, terutama kaum perempuan yang menurut dia sangat tertindas oleh tradisi kolot yang membelenggunya. Salah seorang muridnya, saat ini barangkali tengah membuat heboh perusahaan Anda.”

“Maksud Anda ?”

Kresna tersenyum. “Mungkin Anda mengenal nama Pratiwi?” (De Winst, 2010:104-105)



Data tersebut menunjukkan bagaimana organisasi politik Partai Rakyat dijadikan sebagai media atau alat untuk perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan ideologi maupun cita-cita memperjuangkan kebebasan dari budaya patriarki dan tradisi-tradisi kolot yang membelenggu kaum perempuan, meskipun kemudian konsekuensinya dianggap melanggar tata krama atau pun *paugeran* yang melekat pada diri perempuan. Semangat perjuangan dan membebaskan kaum perempuan diperlihatkan oleh pengarang yang tercermin pada diri Sekar Pembayun, dengan mengikuti kegiatan Partai Rakyat selama bertahun-tahun. Bahkan keikutsertaannya dalam partai sebenarnya ditentang oleh ayahandanya dengan membatasi gerakannya tapi ia senantiasa berontak. Dan berusaha memanfaatkan berbagai celah yang ia dapati untuk berperan dalam pergerakan menuju kemerdekaan. Dan klimaks dari semangat dan keberpihakan dirinya terhadap perjuangan dan pembebasan kaum perempuan bangsanya mengalami kekerasan ideologi yang dilakukan ayahandanya dengan dipenjara di kompleks Dalem Suryakusuman.

Pengarang menyadari bahwa organisasi politik merupakan media yang tepat sebagai sebuah alat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan bagi kaum perempuan atas penindasan yang dialami. Karena dalam organisasi politik terkandung pembelajaran politik tentang kesadaran pentingnya berbangsa dan bernegara, kepemimpinan (*leadership*), institusi yang memberi ruang bagi proses demokratisasi, dan mengelola kekuasaan. Melihat fungsi dari partai politik itulah, Afifah Afra memanfaatkannya untuk kemudian mengaktualisasikan ideologi sastra pembebasan dengan memunculkan tokoh Sekar Pembayun sebagai penyampai tema dan alur cerita dengan mendeskripsikan keterlibatannya dalam Partai Rakyat. Latar belakang Sekar Pembayun mengikuti Partai Rakyat selama bertahun-tahun diceritakan berangkat dari keinginan dan cita-citanya memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan Belanda dan membebaskan kaum perempuan dari belenggu tradisi kolot (budaya patriarki) yang justru memposisikan perempuan sebagai subordinat dan subaltern (kaum yang tertindas).

## **7. Media Massa Sebagai Sarana Penyebar Semangat Perlawanan**

Pers memiliki fungsi kontrol sosial dan politik terhadap perilaku dan praktik kekuasaan dari pihak penguasa. Melalui pers yang direpresentasikan dalam wujud media massa



memiliki peran strategis bagi upaya mencerdaskan publik serta keterbukaan akan berbagai informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat. Justru melalui peran pers, maka masyarakat mengalami kemajuan yang luar biasa bagi peningkatan kualitas intelektual dan kesejahteraan masyarakat juga terhadap praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dan kesewenang-wenangan yang menimbulkan ketidakadilan. Pers melalui media massa menjadi alat yang efektif terhadap fungsi kontrol sosial dan politik penguasa.

Sistem politik di mana pers beroperasi sangat mempengaruhi. Pers menjadi instrumen “pengawasan sosial” antarorang dan lembaga di masyarakat<sup>10</sup>. Pendapat yang dikemukakan oleh Siebert juga didukung oleh fungsi dan sistem pers di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Bab II Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 6 bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) menegaskan nilai-nilai dasar demokratisasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, pers merupakan satu instrumen penting bagi upaya pembebasan dan perlawanan, baik secara politik, sosial maupun budaya serta penyadaran akan hak-hak asasi dari bangsa yang terjajah dan terindas oleh penguasa. Dalam novel *De Winst* karya Afifah Afra sebagai penulis memunculkan pers sebagai media pembebasan dan perlawanan intelektual yang tercernin dari penggambaran karakter dan peran tokoh Sekar Pembayun, meskipun untuk publisitasnya menggunakan nama samaran perempuan Belanda yaitu Elizabeth Watson.

Rangga tahu, bahwa Sekar adalah seorang gadis muda yang cerdas. Namun, bahwa ia secemerlang itu – tentu saja jika Kresna tidak berbohong – baru saat ini ia menyadarinya. Artikel-artikel Elizabeth Watson yang sering dimuat di Koran-koran baik berbahasa Belanda maupun Melayu seperti *De Express*, *De Java Bode*, *Fikiran Rakyat* atau

<sup>10</sup> Freds Siebert, dkk, *Four Theories of The Press*, Jakarta: PT. Intermedia, 1986, hlm. 1.



Si Po, merupakan tulisan yang bermutu tinggi. Karena Rangga adalah pecinta sastra, ia pun tahu, bahwa muatan sastra yang diangkat oleh penulis itu, sangat kental. Tak terbayangkan jika karya sehebat itu, dihasilkan oleh seorang gadis yang masih begitu muda. Gadis yang sejak kecil sudah dijdodohkan dengannya. (De Winst, 2010:108).

Afifah Afra paham akan pentingnya peran pers dalam memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan, sehingga dalam karya sastra yang ditulisnya juga menjadikan sarana pers sebagai bagian dari alur cerita yang melekat pada karakter tokoh utama perempuan yaitu Sekar Pembayun. Sekar Pembayun dideskripsikan sebagai perempuan cerdas yang memiliki kemampuan menulis artikel dalam bahasa Belanda dan Melayu dengan menyamarkan namanya menjadi Elizabeth Watson. Melalui artikel yang ditulisnya di media massa memberikan pencerahan dan kesadaran bagi kaum pribumi terpelajar tentang pentingnya memperjuangkan hak-hak asasi kaum perempuan terhadap praktik penjajahan oleh kulit Putih Eropa dan sistem budaya yang membelenggu kebebasan mereka seperti budaya patriarki yang kental pada masyarakat Jawa di Surakarta ketika itu.

Tulisan artikel dari Sekar Pembayun atau Elizabeth Watson di Koran *De Epress, De Java Bode, Fikiran Rakyat* atau *Si Po*, diakui oleh Rangga merupakan tulisan yang bermutu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata perempuan pribumi juga memiliki kemampuan dan kecerdasan intelektual dan mampu menuangkan ide dan gagasannya tentang perjuangan meraih kemerdekaan bagi kaum pribumi dalam bahasa Belanda dan Melayu. Kemampuan dalam menguasai bahasa Belanda dan Melayu benar-benar dipergunakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat Jawa terpelajar dari kalangan priyayi ningrat. Dengan membaca artikel yang ditulis oleh Sekar Pembayun diharapkan dapat menjadi motivasi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara serta melakukan pembebasan terhadap praktik kolonialisasi yang dialami oleh kaum pribumi. Para golongan ningrat terpelajar seyogyanya menjadi pelopor suatu gerakan perlawanan dan pembebasan kaum pribumi.

Melalui artikel yang ditulisnya, Sekar Pembayun melakukan fungsi kontrol sosial dan politik terhadap perilaku sewenang-wenang penguasa penjajah Belanda. Dengan menyaru sebagai Elizabeth Watson, secara strategi politik ingin menunjukkan kepada publik tentang adanya keberpihakan dari golongan perempuan Eropa yang



menentang praktik kolonialisme Belanda terhadap bangsa Indonesia. Justru hal ini akan memantik lahirnya semangat kebersamaan dan perlawanan serta pembebasan dari kaum perempuan Eropa terhadap kaum perempuan pribumi. Setidaknya ada dorongan *spirit equality* yang digagas oleh seorang perempuan Eropa, walaupun sejatinya perempuan ningrat pribumi, akan pentingnya pengakuan hak asasi manusia dan kemerdekaan sebagai bangsa. Apa yang ditunjukkan oleh Elizabeth Watson atau Sekar Pembayun dengan memanfaatkan media pers bagi proses pembelajaran dan pembebasan kaum perempuan pribumi terhadap praktik-praktik ketidakadilan gender merupakan aktualisasi dari esensi dan fungsi pers itu sendiri. Pers benar-benar didudukkan sebagai alat perjuangan melawan ketidakadilan dan menjunjung tinggi kebenaran dalam konteks perjuangan melawan penindasan. Pers sangat efektif sebagai media informasi dan komunikasi antarmasyarakat dan lembaga dalam melakukan kontrol sosial dan politik terhadap penguasa, termasuk ketika masa kolonialisme. Sejarah mencatat peran dan fungsi pers dalam konteks perjuangan merebut kemerdekaan sampai kemudian melahirkan satu ketetapan bersama akan lahirnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bertanahair dalam satu ikatan Negara.

## **8. Simpulan**

Karya sastra bergenre sejarah sangat identik dengan bentuk-bentuk perlawanan dan pembebasan terhadap praktik kolonialisme yang memiliki kecenderungan penindasan dan penistaan terhadap kaum pribumi. Masyarakat pribumi selalu diposisikan sebagai subaltern, budak, belum beradab sehingga stereotype yang melekat sangat subordinat dan meremehkan seperti sebutan *inlander*. Kaum perempuan pribumi seringkali menjadi korban dari pola-pola memperadabkan masyarakat jajahan oleh kaum kolonialis. Melalui pendekatan kritik sastra feminisme postkolonial, keberadaan karya sastra benar-benar berfungsi sebagai sebuah media pembebasan kultural. Artinya, sastra sebagai produk kebudayaan mampu memberikan proses pencerdasan dan pembebasan dari stereotype yang melemahkan perempuan secara konstruksi social maupun budaya.

Afifah Afra sebagai novelis perempuan mampu menghadirkan karya sastra yang ditulisnya sebagai sarana pembebasan terhadap belenggu sosial dan budaya terhadap posisi perempuan. Melalui tema dan plot serta persoalan yang diketengahkan dalam novel *De Winst*, Afifah Afra mampu menghadirkan semangat perlawanan dan



pembebasan yang berorientasi pada *equality* gender yang dipelopori oleh seorang perempuan dari golongan ningrat dan terpelajar. Sekar Pembayun menyadari bahwa kemajuan dan terbebasnya kaum perempuan pribumi dari praktik ketidakadilan gender hanya dapat dilakukan oleh kaum terpelajar. Namun, pada masa kolonialis Belanda tidak banyak kaum perempuan yang terlibat dalam pergerakan nasional menuju kemerdekaan karena mereka berada dalam subordinasi dan hegemoni budaya patriarki tidak saja dari kaum kolonialis melainkan juga kaum ningrat Jawa. Oleh karena itu, Sekar Pembayun pun berani mengambil risiko menerima hukuman penjara dari ayahandanya di Ndalem Suryakusuman karena melakukan pemberontakan dengan menerabas dan meruntuhkan *pawegeran* yang berlaku di kalangan ningrat Keraton Surakarta.

Keterlibatannya dalam Partai Rakyat, mendirikan sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi dan mendidik Pratiwi gadis desa hingga mampu menjadi perwakilan rakyat dalam melakukan negosiasi dengan Tuan Biljmeer selaku pemilik Pabrik Gula *De Winst*, menentang perjodohan dengan sesama bangsawan ningrat, dan kemampuannya menulis artikel melalui media massa sebagai wujud kontrol sosial politik dan protes terhadap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum kolonialis Belanda merupakan bentuk perlawanan dan pembebasan yang dilakukannya terhadap hegemoni dan praktik kolonialisme. Apa yang direpresentasikan oleh Afifah Afra melalui tokoh Sekar Pembayun atau Kresna atau Elizabeth Watson merupakan kritik sastra feminisme postkolonial. Bagaimana melalui karya sastra yang ditulisnya, Afifah Afra memberikan suatu pemahaman tentang ideologi sastra pembebasan bagi terciptanya kesadaran perempuan akan *equality* gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afra, Afifah. *De Winst*. Cetakan Ketiga. Solo: Afra Publishing, 2010.
- Ashcroft, Bill, dkk. *Menelanjangi Kuasa Bahasa : Teori dan Praktik Sastra Postkolonial*. Terjemahan Sirojuddin Arif. Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Chatman, Seymour. *Story and Discourse, Narrative Structure in Fiction and Film*, Ithaca: Cornell University Press, 1978.



Gumilar, Trisna. "Tubuh dan Penubuhan Dalam Cerpen Sri Sumarah Karya Umar Kayam : Telaah Pascakolonial dan Feminisme". *Jurnal Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto*. Vol.3. No. 2, 2008, hlm. 290-301.

Luxemburg, Bal dan Weststjein. *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Nyoman Kuntha Ratna, *Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Pradopo, Rachmat Djoko. *Pengkajian Puisi*, Yogyakarta: Gajah Mada Univerity Perss, 1990.

Siebert, Freds, dkk. *Four Theories of The Press*. Jakarta: PT. Intermedia, 1986.

Sofia, Adab. *Aplikasi Kritik sastra Feminisme Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.



ISSN 1829-975X



9 771829 975046